1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

A. Perkembangan Inflasi Daerah

1. Inflasi Triwulan III

Perkembangan inflasi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan tren peningkatan dan perlu mendapat perhatian apabila dibandingkan dengan sasaran inflasi nasional tahun 2026 sebesar 2,5 ± 1% . Inflasi tahunan (yoy) Kabupaten Penajam Paser Utara pada Juli 2026 tercatat sebesar 2,34%, sehingga masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional. Namun, inflasi tahunan meningkat menjadi 3,68% pada Agustus dan mencapai 4,18% pada September 2026. Dengan demikian, inflasi tahunan Kabupaten Penajam Paser Utara telah melampaui batas atas sasaran inflasi nasional sejak Agustus 2026 dan terus meningkat hingga akhir triwulan.

Di sisi lain, inflasi tahun Kalender (ytd) juga menunjukkan peningkatan, dari 3,00% pada Juli menjadi 3,53% pada Agustus dan 4,11% pada September 2026. Sementara itu, inflasi bulanan (mtm) meningkat dari 0,28% pada Juli menjadi 0,52% pada Agustus dan 0,56% pada September 2026. Perkembangan tersebut mengindikasikan adanya tekanan kenaikan harga yang semakin menguat selama Triwulan III Tahun 2026.

Berikut perkembangan laju inflasi selama Triwulan III Tahun 2026:

Laju Inflasi	Juli	Agustus	September
Bulanan (mtm)	0,28	0,52	0,56
Tahun Kalender (ytd)	3,00	3,53	4,11
Tahunan (yoy)	2,34	3,68	4,18

Secara keseluruhan, perkembangan inflasi pada Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan bahwa tantangan pengendalian inflasi di Kabupaten Penajam Paser Utara semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan langkah pengendalian yang terkoordinasi, responsif, dan tepat sasaran untuk meredam tekanan harga serta mendorong inflasi kembali ke dalam rentang sasaran inflasi. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas perekonomian daerah.

2. Perkembangan Inflasi Bulan Juli 2026

Pada bulan Juli 2026, Kab. PPU tercatat inflasi sebesar 0,28% (mtm). Sementara secara tahunan, IHK Kab. PPU tercatat inflasi sebesat 2,34% (yoy), lebih rendah dibandingkan nflasi Nasional yang tercatat inflasi 2,88% (yoy), dan juga lebih rendah dari gabungan 4 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat inflasi 3,31% (yoy). Sementara itu, inflasi tahun kalender Kab. PPU hingga Juli 2026 telah tercatat sebesar 3,00% (ytd), telah melampaui nilai tengah sasaran inflasi Nasional 2026 (2,5±1%). Inflasi yang terjadi pada Juli 2026 disebabkan oleh kenaikan harga pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, akibat terbatasnya pasokan dan produksi yang dipengaruhi oleh periode hujan yang masih berlangsung, serta meningkatnya biaya kemasan, dan logistik akibat kenaikan harga BBM, di

tengah kuatnya permintaan.

Penyumbang inflasi di Kab. PPU terutama bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil sebesar 0,11% (mtm). Selanjutnya, komoditas utama penyumbang inflasi pada Juli 2026 di Kab. PPU adalah Daging Ayam Ras, Ikan Tongkol, Ikan Layang, Bensin, dan Bahan Bakar Rumah Tangga. Komoditas Daging Ayam Ras mengalami peningkatan, disebabkan oleh keterbatasan pasokan ayam beku dari wilayah Jawa dan ayam segar dari daerah sekitar PPU, serta sebagai kompensasi kenaikan biaya pakan, ditengah masih tetap kuatnya permintaan. Harga Ikan Tongkol dan Ikan Layang mengalami peningkatan, disebabkan oleh menurunnya hasil tangkapan nelayan lokal, akibat tingginya gelombang laut di wilayah perairan PPU dan sekitarnya, ditengah permintaan yang tetap kuat. Bensin mengalami peningkatan harga disebabkan oleh kebjjakan Pertamina menaikkan harga Pertamax (RON 92) mulai 10 Juli 2026 menjadi Rp16.650 per liter, dari sebelumnya Rp12.600 per liter. Sementara itu, Bahan Bakar Rumah Tangga mengalami peningkatan harga sebagai kompensasi penyesuaian harga jual di tingkat pengecer seiring naiknya harga bahan baku energi dan biaya distribusi, serta meningkatnya biaya operasional dan logistik, sehingga mendorong kenaikan harga yang dibayarkan oleh konsumen.

Sementara itu, komoditas penyumbang deflasi di Kab. PPU terutama berasal dari Cabai Rawit, Tomat, Buncis, Jagung Manis, dan Kacang Panjang. Komoditas Cabai Rawit, Tomat, Buncis, Kacang Panjang mengalami penurunan harga didukung oleh meningkatnya pasokan, sejalan dengan masuknya periode panen di sejumlah sentra produksi di Jawa dan Sulawesi, sehingga mendorong peningkatan ketersediaan stok di pasar. Di sisi lain, Jagung Manis mengalami penurunan harga didukung oleh meningkatnya pasokan dari sentra produksi lokal maupun dari luar wilayah PPU, sehingga mendorong penurunan harga di tingkat pedagang dan konsumen.

Berdasarkan komoditasnya, tekanan inflasi Kabupaten Penajam Paser Utara periode Juli 2026 tertuang dalam tabel berikut:

Komoditas Andil mtm		Komoditas Andil yoy	
Komoditas Inflasi	Komoditas Deflasi	Komoditas Inflasi	Komoditas Deflasi
Daging Ayam Ras	Cabai Rawit	Ikan Layang	Tomat
Ikan Tongkol	Tomat	Emas Perhiasan	Cabai Rawit
Ikan Layang	Buncis	Bensin	Kelapa
Bensin	Jagung Manis	Ikan Tongkol	Sawi Hijau
Bahan Bakar Rumah Tangga	Kacang Panjang	Bahan Bakar Rmah Tangga	Kangkung

Sumber: BPS Kab. PPU

3. Perkembangan Inflasi Bulan Agustus 2026

Pada bulan Agustus 2026, Kab. PPU tercatat mengalami inflasi sebesar 0,52% (mtm). Sementara secara tahunan, IHK Kab. PPU tercatat inflasi sebesar 3,68% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi tahunan nasional yang tercatat 3,19% (yoy), namun lebih rendah dari gabungan 4 Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat inflasi 3,83% (yoy). Sementara itu, inflasi tahun kalender Kab. PPU hingga Agustus 2026 tercatat sebesar 3,53% (ytd), telah

melampaui batas atas sasaran inflasi Nasional 2026 (2,5±1%). Inflasi yang terjadi pada Agustus 2026 disebabkan oleh kenaikan harga pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang disebabkan oleh menurunnya pasokan dari daerah sentra produksi di Jawa dan Sulawesi akibat menguatnya kondisi kemarau, yang memengaruhi tingkat produksi. Selain itu, kenaikan biaya kemasan dan logistik, turut mendorong peningkatan harga ditengah permintaan yang masih tetap kuat.

Penyumbang inflasi di Kab. PPU terutama berasal dari Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil sebesar 0,41% (mtm). Selanjutnya, komoditas utama penyumbang inflasi pada Agustus 2026 di Kab. PPU adalah Daging Ayam Ras, Ikan Tongkol, Cabai Rawit, Pemeliharaan/Service, dan Buncis. Daging Ayam Ras mengalami peningkatan harga, disebabkan oleh terbatasnya pasokan ayam beku dari wilayah Jawa dan ayam segar dari daerah PPU dan sekitarnya, serta sebagai kompensasi atas kenaikan biaya pakan ternak, ditengah masih tetap kuatnya permintaan. Harga Ikan Tongkol mengalami peningkatan, disebabkan oleh menurunnya hasil tangkapan akibat tingginya gelombang laut di wilayah perairan PPU dan sekitarnya, sehingga jumlah nelayan yang melaut lebih terbatas. Harga Cabai Rawit dan Buncis mengalami peningkatan, disebabkan oleh menurunnya pasokan dari daerah sentra produksi (Jawa dan Sulawesi), akibat kondisi cuaca kemarau yang memengaruhi tingkat produksi. Pemeliharaan/*service* mengalami peningkatan harga, seiring naiknya biaya operasional bengkel, terutama akibat kenaikan harga suku cadang dan bahan pendukung *service* termasuk pelumas, sehingga penyedia jasa menaikkan tarif *service* sebagai kompensasi atas kenaikan biaya.

Sementara itu, komoditas penyumbang deflasi terdalam di Kab. PPU terutama berasal dari komoditas Tomat, Bawang Merah, Ikan Layang, Kelapa, dan Bawang Putih. Tomat, dan Bawang Merah mengalami penurunan harga, didukung oleh meningkatnya pasokan, sejalan dengan masuknya periode panen di sejumlah daerah sentra produksi (Jawa dan Sulawesi), sehingga mendorong naiknya ketersediaan stok di pasar. Ikan Layang mengalami penurunan harga, didukung oleh masih tingginya tangkapan nelayan untuk jenis ikan ini sejalan dengan masih terjadinya migrasi ikan pelagis kecil (ikan layang) ke wilayah perairan PPU dan sekitarnya. Kelapa mengalami penurunan harga, didukung oleh meningkatnya pasokan dari petani lokal di wilayah sekitar Penajam Paser Utara, sehingga mendorong peningkatan ketersediaan stok. Sejalan dengan itu, Bawang Putih mengalami penurunan harga, didukung oleh meningkatnya pasokan impor, sehingga mendukung kelancaran distribusi dan peningkatan ketersediaan stok di pasar.

Berdasarkan komoditasnya, tekanan inflasi Kabupaten Penajam Paser Utara periode Agustus 2026 tertuang dalam tabel berikut:

4. Perkembangan Inflasi Bulan September 2026

Pada bulan September 2026, Kab. PPU tercatat mengalami inflasi sebesar 0,56% (mtm). Sementara secara tahunan, IHK Kab. PPU tercatat inflasi sebesar 4,18% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi tahunan Nasional yang tercatat 3,28% (yoy) dan inflasi gabungan 4 Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat 3,98% (yoy). Sementara itu, inflasi tahun Kalender Kab. PPU hingga September 2026 tercatat sebesar 4,11% (ytd), telah melampaui batas atas sasaran inflasi Nasional 2026 (2,5±1%). Selanjutnya, inflasi yang terjadi pada September 2026 disebabkan oleh kenaikan harga pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau akibat menurunnya pasokan dari daerah sentra produksi, yaitu Jawa Timur dan Sulawesi Selatan akibat dampak el nino yang semakin menguat, sehingga memengaruhi tingkat produksi sejumlah komoditas pangan dan hortikultura. Kenaikan harga juga merupakan dampak kenaikan biaya logistik yang terkompensasi pada harga jual.

Penyumbang inflasi di Kab. PPU terutama berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil sebesar 0,40% (mtm). Selanjutnya, komoditas utama penyumbang inflasi pada September 2026 di Kab. PPU adalah Cabai Rawit, Tomat, Jagung Manis, Kacang Panjang, dan Jeruk. Cabai Rawit, Tomat, dan Jagung Manis mengalami peningkatan harga, disebabkan oleh menurunnya pasokan dari daerah sentra produksi (Jawa Timur dan Sulawesi Selatan), akibat kondisi cuaca el nino sehingga memengaruhi tingkat produksi di kedua daerah sentra produksi, ditengah masih tetap kuatnya permintaan. Harga Kacang Panjang mengalami peningkatan, disebabkan oleh menurunnya pasokan dari petani lokal di Wilayah PPU dan sekitarnya, akibat kondisi cuaca el nino yang memengaruhi tingkat produksi. Selanjutnya harga Jeruk mengalami peningkatan, disebabkan oleh terbatasnya pasokan akibat kondisi cuaca el nino yang memengaruhi tingkat produksi, dan sebagai dampak telah berakhirnya panen raya, serta sebagai kompensasi atas kenaikan biaya logistik.

Komoditas Andil mtm		Komoditas Andil yoy	
Komoditas Inflasi	Komoditas Deflasi	Komoditas Inflasi	Komoditas Deflasi
Daging Ayam Ras	Tomat	Ikan Tongkol	Bawang Merah
Cabai Rawit	Ikan Layang	Emas Perhiasan	Tomat
Pemeliharaan/Service	Kelapa	Bensin	Kelapa
Bawang Merah	Bawang Putih	Ikan Layang	Daun Singkong

Sumber: BPS Kab. PPU

Sementara itu, komoditas penyumbang deflasi di Kabupaten PPU terutama berasal dari Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil sebesar 0,03% (mtm). Adapun lima komoditas penyumbang deflasi terdalam pada periode September 2026 adalah Ikan Tongkol, Ikan Layang, Udang Basah, Ikan Kembung dan Telur Ayam Ras. Ikan Tongkol, Ikan Layang, dan Ikan Kembung mengalami penurunan harga, didukung oleh meningkatnya hasil tangkapan nelayan di wilayah perairan PPU dan sekitarnya, sejalan dengan kondisi cuaca yang mendukung sehingga mendorong peningkatan stok dan ketersediaan pasokan di pasar. Udang Basah mengalami penurunan harga, didukung oleh meningkatnya pasokan udang dari hasil budidaya tambak dan dari hasil tangkapan nelayan, sehingga mendorong meningkatnya ketersediaan stok di pasar. Selanjutnya harga Telur Ayam Ras mengalami penurunan harga,

didukung oleh meningkatnya pasokan dari daerah sentra produksi (Jawa Timur dan Sulawesi Selatan) serta pasokan dari peternak lokal, sehingga mendorong peningkatan ketersediaan stok di pasar.

Berdasarkan komoditasnya, tekanan inflasi Kabupaten Penajam Paser Utara periode September 2026 tertuang dalam tabel berikut:

Komoditas Andil mtm		Komoditas Andil yoy	
Komoditas Inflasi	Komoditas Deflasi	Komoditas Inflasi	Komoditas Deflasi
Cabai Rawit	Ikan Tongkol	Cabai Rawit	Beras
Tomat	Ikan Layang	Emas Perhiasan	Bawang Merah
Jagung Manis	Udang Basah	Bensin	Kelapa
Kacang Panjang	Ikan Kembung	Semangka	Udang Basah
Jeruk	Telur Ayam Ras	Bahan Bakar Rumah Tangga	Daun Singkong

Sumber: BPS Kab. PPU

5. Perbandingan Perkembangan Inflasi Triwulan II dan Triwulan III Tahun 2026

Secara umum, perkembangan inflasi tahunan Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan bahwa tekanan inflasi pada triwulan III tahun 2026 cenderung lebih kuat dibandingkan triwulan II.

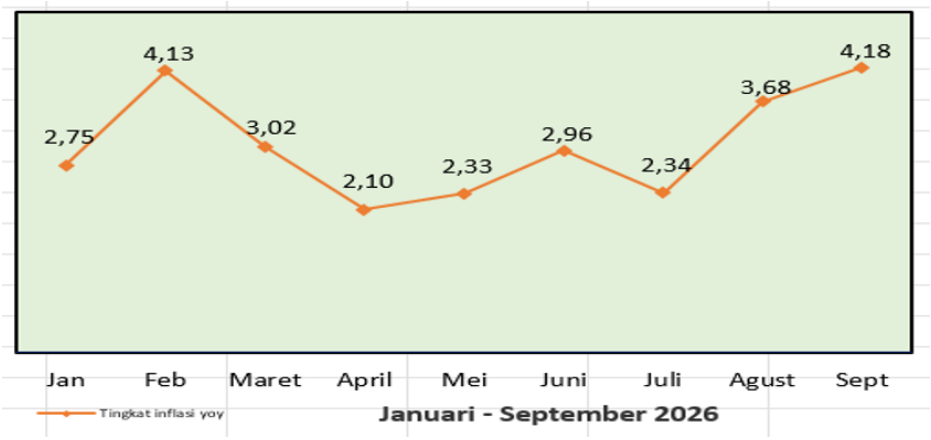
Pada triwulan II, inflasi meningkat secara bertahap dari 2,10% pada April menjadi 2,96% pada Juni. Sementara itu, pada triwulan III, inflasi sempat turun menjadi 2,34% pada Juli, kemudian meningkat tajam hingga mencapai 4,18% pada September.

Pada triwulan III tahun 2026, inflasi tahunan mengalami perkembangan yang lebih berfluktuasi. Pada Juli, inflasi tercatat sebesar 2,34% turun 0,62% dibandingkan Juni. Namun, inflasi kembali meningkat menjadi 3,68% pada Agustus dan mencapai 4,18% pada September.

Dengan demikian, inflasi tahunan meningkat sebesar 1,84% dari Juli hingga September. Kenaikan tersebut menunjukkan penguatan tekanan harga menjelang akhir triwulan III. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi salah satu penyumbang utama inflasi di Kabupaten PPU.

Tingkat inflasi tahunan Kabupaten Penajam Paser Utara periode Januari – September 2026 tertuang dalam grafik berikut:

Tingkat Inflasi Tahunan (yoy) Kab. PPU (Persen)



B. Perkembangan Harga di Kabupaten Penajam Paser Utara

1. Perkembangan Harga Bulan Juli 2026

Memasuki minggu pertama Juli, harga Cabe Rawit Merah di PPU mengalami penurunan sebanyak 20% dari Rp62.500 menjadi Rp50.000, setelah meningkat sebanyak 13,6% pada minggu sebelumnya. Selain itu, harga Bawang Merah juga menunjukkan adanya penurunan sebanyak 9,3% dari Rp54.000 menjadi Rp49.000. Sementara harga Bawang Putih justru mengalami peningkatan sebanyak 5,6% dari Rp45.000 menjadi Rp47.500.

Di minggu kedua Juli, harga Cabe Rawit Merah, Bawang Merah, dan Bawang Putih di PPU masih bertahan di harga masing-masing Rp50.000, Rp49.000, dan Rp47.500. Sementara harga Telur Ayam Ras mengalami penurunan sebanyak 8,1% dari Rp32.650 menjadi Rp30.000. Begitu pula dengan harga Ikan Layang yang turun sebanyak 9,1% dari Rp55.000 menjadi Rp50.000.

Memasuki minggu ketiga Juli, harga Cabe Rawit Merah di PPU terpantau mengalami penurunan sebanyak 10% dari Rp50.000 menjadi Rp45.000. Begitu pula dengan harga Bawang Merah dan Bawang Putih yang turun masing-masing sebanyak 3,1% menjadi Rp47.500 dan 5,3% dari Rp47.500 menjadi Rp45.000. Sementara harga Ikan Layang justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebanyak 25% dari Rp40.000 menjadi Rp50.000.

Pada minggu keempat Juli, setelah turun sebanyak 10% pada minggu sebelumnya, harga Cabe Rawit Merah di PPU terpantau kembali mengalami penurunan sebanyak 11,1% dari Rp45.000 menjadi Rp40.000. Begitu pula dengan harga Cabe Merah Besar yang turun sebanyak 12,5% dari Rp80.000 menjadi Rp70.000. Sementara untuk harga Cabe Merah Keriting justru mengalami peningkatan sebanyak 11,1% dari Rp45.000 menjadi Rp50.000.

2. Perkembangan Harga Bulan Agustus 2026

Di minggu pertama Agustus, harga Cabe Rawit Merah di PPU mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu sebanyak 68,8% dari Rp40.000 menjadi Rp67.500. Peningkatan serupa juga terjadi pada harga Ikan Layang yang meningkat sebanyak 42,9% dari Rp35.000 menjadi Rp50.000. Sementara harga Bawang Merah dan Bawang Putih mengalami penurunan masing-masing sebanyak 10,5% menjadi Rp42.500 dan 7,8% menjadi Rp41.500.

Di minggu kedua Agustus, harga Cabe Rawit Merah di PPU terpantau masih bertahan di harga Rp67.500. Sementara harga Cabe Merah Besar mengalami peningkatan sebanyak 7,7% dari Rp65.000 menjadi Rp70.000. Begitu pula dengan harga Ikan Layang yang meningkat dengan signifikan yaitu sebanyak 42,9% dari Rp35.000 menjadi Rp50.000.

Harga Cabe Rawit Merah di PPU pada minggu ketiga Agustus terpantau mengalami peningkatan sebanyak 22,2% dari Rp67.500 menjadi Rp82.500. Pergerakan serupa juga terjadi pada harga Ikan Layang yang meningkat sebanyak 25% dari Rp40.000 menjadi Rp50.000. Selain itu, harga Daging Ayam Ras juga menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 7,9% dari Rp38.000 menjadi Rp41.000.

Setelah meningkat sebanyak 22,2% pada minggu sebelumnya, harga Cabe Rawit Merah di PPU pada minggu keempat menunjukkan penurunan sebanyak 3% dari Rp82.500 menjadi Rp80.000. Begitu pula dengan harga Bawang Putih yang turun sebanyak 5,9% dari Rp42.500 menjadi Rp40.000. Sementara harga Bawang Merah dan Ikan Layang justru mengalami peningkatan sebanyak 5,9% menjadi Rp45.000 dan 25% menjadi Rp50.000.

3. Perkembangan Harga Bulan September 2026

Di minggu pertama September, harga Cabe Rawit Merah di PPU terpantau mengalami peningkatan sebanyak 12,5% dari Rp80.000 menjadi Rp90.000. Begitu pula dengan harga Ikan Layang yang menunjukkan adanya peningkatan harga sebanyak 11,1% dari Rp45.000 menjadi Rp50.000. Sementara harga Bawang Merah justru mengalami penurunan sebanyak 11,1% dari Rp45.000 menjadi Rp40.000.

Memasuki pertengahan September di minggu kedua, harga Cabe Rawit Merah di PPU terpantau mengalami peningkatan sebanyak 11,1% dari Rp90.000 menjadi Rp100.000. Pergerakan serupa juga terjadi pada harga Cabe Merah Keriting yang meningkat sebanyak 28% dari Rp62.500 menjadi Rp80.000. Selain itu, harga Ikan Layang juga mengalami peningkatan sebanyak 42,8% dari Rp35.000 menjadi Rp50.000.

Di minggu ketiga September, harga Cabe Rawit Merah di PPU terpantau mengalami penurunan sebanyak 15% dari Rp100.000 menjadi Rp85.000. Begitu pula dengan harga Cabe Merah Besar yang turun sebanyak 7,7% dari Rp65.000 menjadi Rp60.000. Adapun untuk harga Ikan Layang justru terpantau mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebanyak 25% dari Rp40.000 menjadi Rp50.000.

Memasuki minggu keempat September, harga Cabe Rawit Merah di PPU terpantau mengalami penurunan sebanyak 5,9% dari Rp85.000 menjadi Rp90.000. Pergerakan serupa juga terjadi pada harga Cabe Merah Keriting yang meningkat sebanyak 14,3% dari Rp70.000 menjadi Rp80.000. Begitu pula dengan harga Ikan Layang yang meningkat sebanyak 42,9% dari Rp35.000 menjadi Rp50.000.

Di minggu kelima September, harga Cabe Rawit Merah di PPU terpantau mengalami peningkatan sebanyak 16,7% dari Rp90.000 menjadi Rp105.000. Begitu pula dengan harga Ikan Layang yang meningkat sebanyak 42,9% dari Rp35.000 menjadi Rp50.000. Selain itu, harga Kacang Panjang juga mengalami peningkatan sebanyak 9% dari Rp18.350 menjadi Rp20.000.

C. Risiko Inflasi Triwulan IV Tahun 2026

Mencermati perkembangan kondisi perekonomian dan inflasi terkini serta tren historis di Kab. PPU, diprakirakan Kab. PPU akan mengalami inflasi, namun lebih landai dan masih dalam level yang terbatas pada Oktober 2026. Risiko El Nino yang semakin meningkat dan berdampak terhadap kesinambungan produksi dan pasokan pangan daerah, terutama akibat dampak kekeringan, yang berisiko menyebabkan penurunan produksi pertanian, krisis air baku, serta meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Musim kemarau yang lebih kering dan berkepanjangan juga berisiko mengganggu ketersediaan air, pola tanam, dan aktivitas budidaya pangan, serta memengaruhi kelancaran distribusi.

Faktor-Faktor Risiko Utama Inflasi Triwulan IV 2026:

1. Risiko El Nino yang masih akan terus berlanjut hingga pertengahan triwulan IV 2026, dan dampaknya yang semakin menguat, beresiko mengganggu produksi dan pasokan pangan. Berdasarkan informasi BMKG, el nino yang sangat kuat masih terus berlanjut hingga pertengahan triwulan IV 2026, sehingga semakin memperparah dan memperpanjang periode kekeringan di sebagian basar wilayah Indonesia. Kondisi tersebut juga berdampak terhadap musim hujan yang datang terlambat dan terjadi lebih singkat. Sebagian besar wilayah Indonesia diprakirakan baru akan mengawali musim hujan pada November 2026, dengan puncaknya pada Desember 2026, termasuk sebagian besar Wilayah Kalimantan. Kondisi ini berisiko akan memengaruhi ketersediaan dan kesinambungan pasokan pangan daerah, termasuk di wilayah PPU.
2. Kekeringan dan Karhutla berisiko menekan produksi pangan lokal serta mengganggu aktivitas ekonomi dan distribusi. Kondisi kemarau yang lebih kering dapat mengurangi ketersediaan air untuk pertanian, mengganggu pola tanam, dan menurunkan produksi komoditas pangan. Dengan perkembangan terkini (September 2026), jumlah lahan lahan pertanian yang terdampak kekeringan hingga puso di PPU tercatat 81 Ha. Di sisi lain, Karhutla juga berisiko mengganggu kegiatan budidaya tanaman pangan. Oleh karena itu, pengamanan sumber air dan pencegahan Karhutla perlu diperkuat, sebagai upaya mitigasi risiko inflasi dari sisi produksi dan pasokan pangan.
3. Ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah masih menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas harga. Keterbatasan produksi lokal menyebabkan pemenuhan sejumlah komoditas pangan strategis masih bergantung pada daerah sentra produksi, terutama Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Sementara itu, berdasarkan analisis BMKG terkini, risiko el nino yang masih berlanjut hingga akhir tahun 2026 telah menyebabkan kekeringan yang semakin meluas pada areal lahan pertanian di kedua wilayah sentra produksi tersebut. Kondisi ini berisiko memengaruhi kesinambungan pasokan di wilayah PPU, mempertimbangkan kedua daerah tersebut menjadi sentra pasokan utama di wilayah PPU, sehingga berisiko memengaruhi kesinambungan pasokan ke depan.
4. Produktivitas dan ketahanan produksi pangan lokal masih perlu diperkuat. Produktivitas pangan lokal yang masih terus berlangsung, menyebabkan pemenuhan sejumlah komoditas strategis masih bergantung pada pasokan dari luar daerah Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam pengendalian inflasi daerah.
5. Tekanan harga kelompok pangan bergejolak (*volatile food*) masih menjadi salah satu risiko utama inflasi daerah. Tingginya kontribusi komoditas pangan (*volatile food*) terhadap inflasi terutama pada tahun 2026 dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan pangan dari daerah sentra produksi dan pasokan pangan produk lokal akibat cuaca el

nino. Sejalan dengan itu, ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar Wilayah Kalimantan Timur turut berkontribusi terhadap perkembangan inflasi kelompok *volatile food* (tahun kalender), sehingga berdampak terhadap inflasi tahun kalender di Wilayah PPU yang telah melampaui batas atas sasaran inflasi nasional 2026. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi kebijakan dan ketepatan intervensi sehingga pasokan dan harga pangan terjaga.

6. Distribusi dan ketersediaan energi masih perlu terus dimitigasi. Risiko peningkatan permintaan BBM bersubsidi dan LPG 3 Kg memberikan tekanan terhadap ketersediaan energi dan harga. Lebih lanjut, gangguan distribusi dan antrean juga berisiko meningkatkan biaya logistik. Oleh karena itu, pengawasan dan pengendalian distribusi Biosolar, Pertalite, dan LPG 3 Kg perlu diperkuat untuk menjaga kesinambungan pasokan dan stabilitas harga.
7. Perluasan operasional SPPG pada semester II 2026 berisiko meningkatkan permintaan komoditas pangan strategis. Bertambahnya jumlah SPPG yang akan beroperasi pada semester II 2026, termasuk di wilayah terpencil, berisiko mendorong peningkatan permintaan berbagai komoditas bahan pangan. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan dan kesinambungan pasokan agar peningkatan permintaan tidak memberikan tekanan yang signifikan terhadap stok dan harga pangan. Upaya ini dapat ditempuh melalui penyiapan menu yang menggunakan bahan pangan lokal.

Selanjutnya, risiko terjadinya inflasi pada bulan Oktober 2026 di Kab. PPU berdasarkan hasil analisis pola historis pergerakan harga untuk beberapa komoditas pangan (bulan September menuju Oktober, kurun waktu 2022-2025) masih berisiko mendukung terjadinya inflasi. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, sejumlah komoditas yang seringkali mendorong kenaikan harga setiap tahun pada bulan Oktober adalah Daging Ayam, Ikan Bandeng, Tomat, Telur, dan Gula Pasir.

Daging Ayam Ras diprakirakan mengalami peningkatan harga disebabkan oleh terbatasnya pasokan ayam beku dari Wilayah Jawa dan ayam segar dari daerah PPU dan sekitarnya, serta sebagai kompensasi kenaikan biaya pakan ternak ditengah masih tetap kuatnya permintaan. Ikan Bandeng berisiko mengalami kenaikan harga sejalan dengan potensi peningkatan permintaan dan keterbatasan pasokan dari daerah pemasok. Tomat diprakirakan berisiko mengalami peningkatan harga akibat resiko penurunan pasokan, khususnya apabila kondisi cuaca dan musim kemarau berdampak terhadap produksi komoditas hortikultura. Harga Telur berisiko meningkat sebagai kompensasi kenaikan biaya pakan ternak dan kenaikan biaya logistik untuk pengiriman telur dari daerah sentra produksi, ditengah permintaan yang tetap kuat.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identiifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi di Daerah

Berdasarkan perkembangan inflasi selama triwulan III tahun 2026, permasalahan utama pengendalian inflasi Kabupaten Penajam Paser Utara meliputi:

1. Ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah

Kab. PPU masih bergantung pada pasokan bahan pokok dari daerah produsen, antara lain Jawa dan Sulawesi. Ketergantungan ini membuat harga di pasar PPU rentan terhadap

gangguan produksi maupun pengiriman barang.

Permasalahan yang perlu ditangani:

- Belum kuatnya kemandirian pasokan untuk sejumlah komoditas pangan strategis.
- Risiko keterlambatan pengiriman dan berkurangnya volume pasokan.
- Perlunya kepastian pasokan melalui kerja sama antar daerah dengan sentra produksi.

2. Gangguan produksi akibat kemarau dan potensi El Nino

Penurunan produksi di sentra pemasok akibat kemarau dan potensi El Nino dapat mengurangi ketersediaan barang di PPU dan mendorong kenaikan harga. Komoditas yang perlu diwaspadai meliputi cabai, sayuran, dan bahan pangan lain yang sensitif terhadap perubahan cuaca.

3. Kenaikan harga pangan strategis dan komoditas perikanan

Permasalahan yang perlu diidentifikasi lebih lanjut:

- Fluktuasi harga ikan akibat perubahan hasil tangkapan dan kelancaran distribusi.
- Kenaikan harga daging ayam ras akibat perubahan pasokan dan biaya produksi.
- Potensi kenaikan harga sayuran dan bumbu dapur ketika pasokan menurun.

4. Tingginya biaya ditribusi dan energi

Biaya transportasi, bahan bakar, dan operasional distribusi berpotensi meningkatkan harga jual barang di tingkat konsumen. Pada bulan Juli, bensin dan bahan bakar rumah tangga juga tercatat sebagai komoditas penyumbang inflasi PPU.

Isu pengendalian yang perlu diperhatikan adalah efisiensi rantai pasok, biaya angkutan dari sentra produksi, serta kelancaran distribusi melalui jalur darat dan laut.

5. Perlunya penguatan efektivitas intervensi TPID, terutama dalam pemantauan harga dan stok, pelaksanaan Operasi Pasar, Gerakan Pangan Murah, serta penguatan kerja sama antar daerah.

6. Risiko melemahnya daya beli masyarakat

Kenaikan harga kebutuhan pokok yang berlangsung beberapa bulan dapat meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Risiko ini perlu menjadi perhatian ketika kenaikan harga pangan terjadi bersamaan dengan kenaikan biaya transportasi dan kebutuhan energi.

Permasalahan yang perlu ditangani:

- Harga komoditas strategis yang semakin sulit dijangkau sebagian masyarakat.
- Perbedaan harga antarpasar atau antarkecamatan.
- Kebutuhan memastikan pangan bersubsidi atau pangan murah menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

Secara keseluruhan, permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan bahwa tantangan utama tidak hanya terletak pada pengendalian harga di hilir,

tetapi juga pada penguatan sisi hulu (produksi), distribusi, serta efektivitas kebijakan intervensi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis pada identifikasi permasalahan secara menyeluruh.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

Pelaksanaan strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K) selama Triwulan III Tahun 2026 secara umum menunjukkan hasil yang cukup efektif dalam menjaga stabilitas harga di Kabupaten Penajam Paser Utara.

1. **Keterjangkauan Harga**
   - Pemantauan harga bahan pokok pada pasar pantauan setiap hari.
   - Pemantauan harga komoditas hortikultura di tingkat petani dan harga eceran.
   - Pemantauan harga ikan di Pasar Induk Penajam setiap hari pasar.
   - Monitoring ke Distributor sembako secara berkala kolaborasi Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. PPU dengan Dinas Perindagkop Provinsi Kalimantan Timur.
   - Monitoring harga di Pasar Induk Penajam bersama dengan Polda Kaltim, Polres PPU, Satgas Pangan, dan Dinas KUKM Perindag Kab. PPU tanggal 31 Juli 2026.
   - Sidak harga minyak goreng Minyakita pada toko retail modern tanggal 23 September 2026.
   - Operasi Pasar Pasar Sembako dan Gas LPG 3 Kg oleh Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. PPU pada tanggal:
     1. 10 Agustus 2026 di Halaman Kantor Kelurahan Penajam.
     2. 11 Agustus 2026 di Halaman Kantor Kelurahan Waru.
     3. 13 Agustus 2026 di Halaman Kantor Kelurahan Maridan.
     4. 14 Agustus 2026 di Halaman Kantor Desa Sukaraja.
   - Gerakan Pangan Murah (GPM) oleh Dinas Ketahanan bekerja sama dengan Bulog pada tanggal:
     1. 14 - 16 Juli 2026 di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan.
     2. 08 September 2026 di Desa Bukit Subur, Kec. Penajam.
     3. 10 September 2026 di Desa Sesulu, Kec. Waru.
     4. 15 September 2026 di Kantor Camat Babulu, Kec. Babulu.
   - Bazar sembako murah dalam rangka HUT TNI ke-81 pada tanggal 22-23 September 2026 di Makodim 0913/Penajam Paser Utara.
2. **Ketersediaan Pasokan**
   - Monitoring penyaluran BBM
   - Sidak ke Pasar Penajam bersama Dinas KUKM Perindag dan Satgas Pangan Polda Kaltim tanggal 18 September 2026.
   - Evaluasi Surat Edaran Bupati tentang Gerakan Tanam Cabai, Gerakan Tanam Tomat serta Gerakan Pemanfaatan pekarangan dengan aneka cabai.
   - Memaksimalkan gerakan pemanfaatan pekarangan bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten PPU.
   - Bentuk inisiatif Pemerintah Daerah untuk menangani dampak penurunan produksi pangan akibat kekeringan/karhutla:
     - Dinas Pertanian mendistribusikan pompa air bagi lahan sawah yang ada/tersedia air permukaan;

Mengusulkan bantuan fasilitas irigasi ke kementerian pertanian;
- Mengusulkan bantuan irigasi perpipaan dan irigasi perpompaan ke kementerian Pertanian;
- Melaporkan insidentil dampak kekeringan yang mengakibatkan puso seluas 46,5 ha ke Dinas Pangan Tanaman Pangan dan hortikultura Provinsi kalimantan Timur;
- Mengusulkan bantuan BBM untuk pompanisasi ke Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Prov Kaltim;
- Mengusulkan bantuan pompanisasi ke DPTPH Prov Kaltim melalui BPBD Daerah Kab PPU;
- Melaporkan insidentil kekeringan pada komoditas Hortikultura Ke DPTPH Prov Kaltim;
- Mengusulkan bantuan droping air baku pertanian dengan truk tangki kepada BWS Kaltim, BPDB Kab PPU dan Dinas Perkim Kab PPU untuk penyelamatan komoditas semangka;
- Bupati PPU menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 sejak dini sebelum kemarau mencapai puncaknya melalui:
    - SK Bupati Nomor 300.2.3/139/2026 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026.
    - SK Bupati Nomor 300.2.3/140/2026 Tentang Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026.

Langkah ini mempercepat pencairan anggaran penanganan dan memperkuat koordinasi lintas sektoral**.**

- Memaksimalkan aplikasi ASAP Digital (Aplikasi Sistem Analisa Pengendalian Karhutla) yang dipasang bersama jajaran polres untuk mendeteksi titik panas (hotspot) pertanian secara real-time.

3. **Kelancaran Distribusi**

- Memperkuat strategi pengamanan distribusi energi, terutama terkait pengawasan dan pengendalian penyaluran BBM bersubsidi jenis Biosolar dan Pertalite.
- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Pemerintah Kabupaten Karo Tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah.
- Perjanjian Kerja Sama antara Perumda Manuntung Sukses Balikpapan dan Asosiasi Pedagang Pasar Kabupaten Penajam Paser Utara.

4. **Komunikasi Efektif**

- Mengikuti rakor inflasi mingguan secara *hybrid* bersama Kemendagri RI.
- Updating harga bapokting setiap hari melalui Lamin Etam dan SP2KP.
- Updating data ketersediaan stok pangan dan neraca ketersediaan pangan di Kab. PPU secara mingguan.
- Pemantauan dan pendataan luas tanam dan panen harian, bulanan, dan tahunan.
- Pelaporan kegiatan pengendalian inflasi secara harian melalui aplikasi wasinflasi.
- Rapat koordinasi Mitigasi Resiko Bencana Kekeringan Air Akibat Musim Kemarau pada tanggal 22 Juli 2026.
- Workshop Tani Camp dan Implementasi Good Agricultural Practice (GAP) tanggal 12 Agustus 2026 di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Petung.
- *High Level Meeting dan Capacity Building* TPID Kab. PPU Periode Agustus 2026 dalam rangka monitoring dan evaluasi, serta perumusan Langkah strategis program pengendalian inflasi daerah tahun 2026 pada tanggal 11 Agustus 2026.
- Rapat Koordinasi Teknis TPID Kab. PPU Agustus 2026 tanggal 4 Agustus 2026.
    -

Rapat penjelasan kerja sama pengolahan gabah oleh Perpadi Kab. PPU (sebagai mitra Bulog) tanggal 26 Agustus 2026 yang dihadiri oleh: Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kaltim dan Kaltara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab.PPU, Komandan Kodim 0913/PPU, Perpadi Kab. PPU, Katimker PPL Kab. PPU.
- Rapat koordinasi dan sinkronisasi data produksi, kebutuhan stok serta penetapan harga bahan kebutuhan pokok di Kab. PPU tanggal 26 Agustus 2026.
- Rapat koordinasi pemanfaatan embung eks tambang PT. PPC sebagai alternatif penyediaan sumber air bersih tanggal 5 Agustus 2026.
- Rapat koordinasi teknis tindak lanjut hasil inflasi Kab. PPU tanggal 7 September 2026 secara *hybrid*.
- Rapat koordinasi justifikasi harga komoditas pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 08 September 2026 di ruang rapat Kepala Bagian Perekonomian dan SDA.
- Rapat tindak lanjut koordinasi justifikasi harga komoditas pangan Kab. Penajam Paser Utara tanggal 23 September di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- Rapat koordinasi dan diskusi awal pendirian SPBU di tanah asset milik Perumda Benuo Taka tanggal 4 September 2026 di ruang rapat Bupati Lantai 3 Kantor Bupati PPU.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

1. Berdasarkan informasi perkembangan inflasi periode Juli-September 2026, tekanan inflasi di Kabupaten PPU menunjukkan peningkatan yang perlu menjadi perhatian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Pada Agustus dan September 2026, Kab. PPU mencatat inflasi bulanan yang relatif tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian inflasi perlu diperkuat, khususnya pada komoditas pangan strategis yang rentan terhadap perubahan cuaca dan gangguan pasokan.

2. Dari sisi **Keterjangkauan Harga,** pelaksanaan pemantauan harga dan program Gerakan Pangan Murah (GPM)/Operasi Pasar merupakan langkah positif untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Namun, inflasi bulanan Kab. PPU yang mencapai 0,52% pada Agustus dan September 2026 menunjukkan bahwa tekanan harga masih perlu diantisipasi. Kenaikan harga cabai rawit, sayuran, tomat, dan jagung manis menjadi indikasi petingnya intervensi yang lebih terarah pada komoditas penyumbang inflasi. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan stabilisasi harga perlu dievaluasi tidak hanya berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap perubahan harga di tingkat konsumen.

Permasalahan yang perlu diperhatikan:

- Kenaikan harga komoditas tertentu belum tentu dapat diatasi melalui operasi pasar secara umum.
- Pelaksanaan GPM perlu disesuaikan dengan lokasi dan waktu terjadinya kenaikan harga.
- Pemantauan harga perlu diikuti dengan tindakan korektif yang cepat.
- Data mengenai jumlah kegiatan GPM, volume komoditas yang dijual, jumlah penerima manfaat, dan perubahan harga setelah intervensi perlu dihimpun untuk mengukur efektivitas kebijakan.

3. Pengendalian inflasi dari sisi **Ketersediaan Pasokan** diarahkan untuk memastikan kecukupan barang kebutuhan pokok dan mencegah kelangkaan komoditas di pasar. Tekanan
-

inflasi pada Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan bahwa ketersediaan pasokan menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar. Kondisi cuaca yang kurang kondusif dan dampak El Nino dapat mengurangi produktivitas komoditas pangan tertentu. Pada saat yang sama, ketergantungan PPU terhadap pasokan dari luar daerah meningkatkan risiko kenaikan harga Ketika terjadi gangguan produksi atau pengiriman. Kenaikan harga cabai rawit, sayuran, dan tomat pada periode Agustus-September 2026 memperkuat pentingnya pengamanan pasokan dan kesiapan distribusi komoditas tersebut. Evaluasi juga perlu memperhatikan apakah data stok dan kebutuhan pangan telah tersedia secara rutin dan dapat digunakan untuk mendeteksi potensi kekurangan pasokan sebelum memengaruhi harga pasar.

Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dan diperkuat oleh TPID Kabupaten PPU meliputi:

- Melakukan pemantauan stok pangan di tingkat produsen, distributor, pedagang besar, dan pasar.
- Memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog, distributor, ritel modern, dan pelaku usaha pangan.
- Mendorong peningkatan produksi pangan lokal, termasuk komoditas hortikultura dan peternakan.
- Mengembangkan kerja sama antardaerah untuk memenuhi kebutuhan pangan yang belum dapat diproduksi secara optimal di Kabupaten PPU.
- Mengantisipasi dampak kekeringan dan fenomena El Nino terhadap produksi pertanian.

Permasalahan yang perlu diperhatikan:

- Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
- Risiko penurunan produksi akibat perubahan cuaca dan kekeringan.
- Belum optimalnya integrasi data stok, kebutuhan, produksi, dan distribusi pangan.
- Potensi ketidaksesuaian antara waktu panen dan kebutuhan pasar.
- Perlunya penguatan kemitraan antara petani, peternak, distributor, dan pelaku usaha.

4. Dari aspek **Kelancaran Distribusi**, tantangan utama Kabupaten PPU adalah menjaga kesinambungan pasokan dari luar daerah serta mengantisipasi kemungkinan peningkatan biaya logistik. Gangguan cuaca dan pengiriman dapat menyebabkan keterlambatan pasokan. Apabila stok di tingkat pedagang terbatas, kondisi tersebut dapat meningkatkan harga jual kepada konsumen. Oleh karena itu,pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan melalui operasi pasar ketika harga sudah meningkat. Pemerintah Daerah perlu memperkuat upaya pencegahan melalui pemetaan jalur distribusi, pemantauan jadwal pengiriman, dan identifikasi komoditas yang rentan mengalami gangguan pasokan.

Permasalahan yang perlu diperhatikan:

- Ketergantungan pada jaur pasokan dari luar daerah.
- Risiko keterlambatan pengiriman akibat cuaca dan kendala logistik.
- Potensi peningkatan biaya transportasi yang diteruskan ke harga jual.
- Belum optimalnya pemantauan biaya distribusi dan disparitas harga antarlokasi.
- Perlunya koordinasi yang lebih cepat antara pemerintah daerah, distributor, dan daerah pemasok.

5. Dari aspek **Komunikasi Efektif**, tantangan utama adalah memastikan informasi harga,

stok, distribusi, dan kebutuhan pangan dapat dihimpun serta ditindaklanjuti secara tepat waktu. Inflasi bulanan PPU yang relatif tinggi pada Agustus dan September 2026 menunjukkan perlunya respon yang cepat terhadap perubahan harga komoditas strategis. Koordinasi antarlembaga perlu diarahkan agar hasil pemantauan harga tidak berhenti pada kegiatan pelaporan, tetapi menjadi dasar pengambilan Keputusan. Misalnya kenaikan harga cabai rawit dan sayuran harus segera diikuti pemeriksaan stok, identifikasi penyebab kenaikan harga, dan penentuan intervensi yang sesuai.

Permasalahan yang perlu diperhatikan:

- Perlunya integrasi informasi harga dan stok dari berbagai sumber.
- Potensi keterlambatan tindak lanjut atas laporan kenaikan harga.
- Perlunya pembagian tugas yang jelas diantara perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
- Belum tersedianya data capaian koordinasi dan kecepatan respon yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas secara kuantitatif.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

Berdasarkan perkembangan inflasi selama Triwulan III Tahun 2026, beberapa rekomendasi yang perlu menjadi perhatian TPID Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai upaya mendorong terkendalinya inflasi, agar berada pada rentang sasaran inflasi nasional 2026, 2,5 ± 1%, antara lain:

1. Peningkatan intesitas pelaksanaan program stabilisasi harga melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), Pasar Murah, dan Operasi Pasar (OP). pelaksanaan stabilisasi harga perlu terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan untuk komoditas pangan strategis dan energi. Untuk mendukung optimalisasi dampak program stabilisasi tersebut, aspek 3T (Tepat Waktu, Tepat Lokasi, dan Tepat Sasaran) perlu menjadi pertimbangan dalam implementasinya.
2. Penguatan pemantauan harga, pasokan, dan ketersediaan pangan secara terintegrasi. TPID terus melakukan pemantauan harga harian, termasuk pembaruan (updating) harga bahan pokok dan barang penting (bapokting) setiap hari melalui aplikasi Lamin Etam, serta monitoring pasokan pada distributor dan pembaruan data ketersediaan stok pangan. Selain itu, pembaruan Neraca Ketersediaan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara dilakukan secara mingguan. Sebagai upaya untuk merumuskan langkah strategis mitigasi risiko kelangkaan dan gangguan pasokan pangan, ditengah risiko dampak El Nino yang semakin menguat di daerah sentra produksi dan PPU. Upaya tersebut turut diperkuat sejalan dengan keikutsertaan masing-masing TPID dalam rapat koordinasi inflasi mingguan secara hybrid bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
3. Penguatan mitigasi dampak El Nino melalui pengamanan sumber air dan produksi pangan. Pemerintah Daerah Kabupaten PPU terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi risiko kekeringan melalui pemantauan kondisi cuaca dan produksi pertanian, optimalisasi pompa dan embung, pengembangan irigasi dan perpompaan, pemetaan sumber air, serta penyediaan dan pengamanan cadangan air untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan.
4. Penguatan dan pengaturan penyaluran BBM bersubsidi, yang mencakup pengaturan jam pelayanan SPBU, pengaturam jenis kendaraan, serta pemberlakuan periode pengisian

ulang untuk menjaga kesinambungn pasokan, mengurangi antrean, mencegah kelangkaan dan penyalugunaan BBM bersubsidi termasuk melalui sinergi dengan PT Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas. Kebijakan tersebut juga diharapkan kelancaran distribusi logistik dan memitigasi risiko peningkatan biaya distribusi pangan.

5. Penguatan Kerja Sama Antardaerah (KAD) untuk mendukung kesinambungan pasokan pangan. Perluasan KAD dengan daerah sentra produksi perlu terus diupayakan, dengan memprioritaskan pada daerah penghasil utama komoditas pangan, serta juga merupakan kontributor utama penyumbang inflasi di PPU, tentunya dengan tetap mempertimbangkan aspek biaya logistik. Lebih lanjut, untuk mendukung optimalisasi peran dan dukungan KAD dalam pemenuhan stok bahan pangan, dan upaya stabilisasi harga, maka pelibatan Perumda perlu diprioritaskan, termasuk menjadi salah satu *offtaker* atas komoditas KAD yang dipasok.
6. Optimalisasi pemanfaatan Belanja Tidak terduga (BTT) sebagai instrumen pengendalian inflasi daerah, antara lain untuk mendukung fasilitasi distribusi dan pemberian subsidi ongkos angkut dalam rangka mengantisipasi potensi kenaikan biaya logistik. Untuk meningkatkan efektivitas implementasinya, pemerintah daerah perlu mempercepat penyelesaian regulasi pendukung serta pemenuhan aspek administrasi yang menjadi dasar pemanfaatan anggaran BTT.
7. Sinergi dan kolaborasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan mitra strategis utama yang tergabung dalam TPID perlu terus diperkuat, dengan berfokus pada Upaya menjamin ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan, untuk meminimalisir tekanan inflasi yang berisiko meningkat terutama akibat dinamika yang terjadi di wilayah produsen di luar Kab. PPU. Selain itu, sejumlah kebijakan strategi penguatan aspek struktural di kab. PPU, diharapkan dapat memitigasi terjadinya gejolak harga komoditas pangan dan hortikultura melalui penguatan tata niaga dan distribusi logistik, peningkatan produktivitas beberaapa komoditas pertanian, moral suasion dan edukasi kepada masyarakat unuk menghindari *forward/panic buying* melalui edukasi belanja bijak secara berkala.